

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

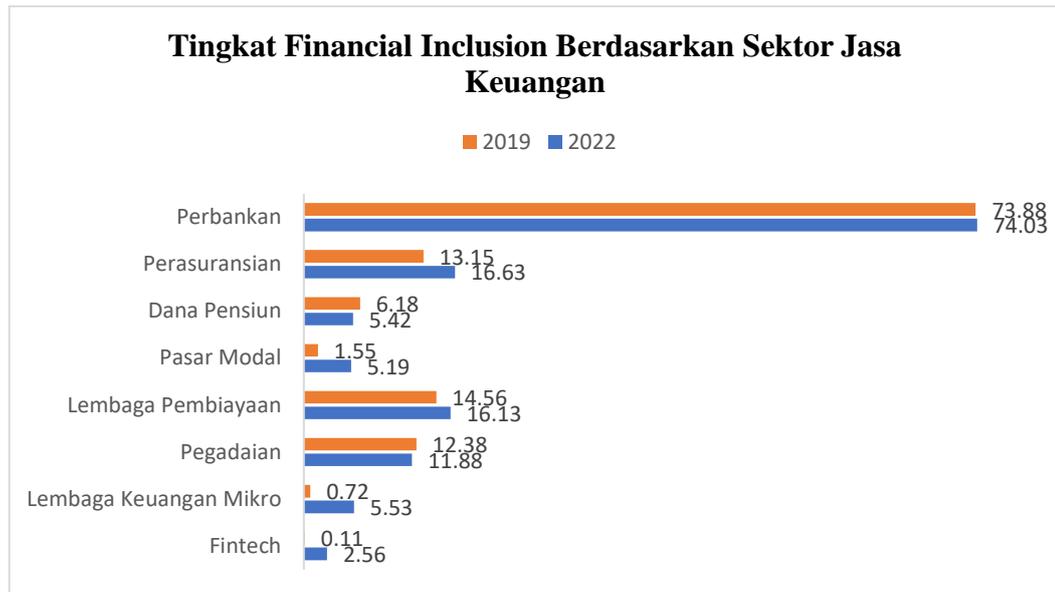
Perkembangan teknologi dan informasi diindentikkan dengan adanya teknologi digital yang berkembang pesat sehingga membawa adanya perubahan pada aspek kehidupan manusia (Alawi et al., 2020). Perkembangan digital tersebut menciptakan inovasi berbasis teknologi digital yang memberikan kemudahan dalam mengakses layanan di bidang keuangan. Akses terhadap layanan keuangan membantu masyarakat dalam hal menabung dan berinvestasi (Sastiono & Nuryakin, 2019). *Financial inclusion* salah satu contoh program perluasan akses keuangan di Indonesia. Istilah *financial inclusion* atau inklusi keuangan muncul pada pasca krisis tahun 2002 karena dampak krisis pada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil dan masyarakat pinggiran) yang *unbanked* sehingga tercatat tinggi di luar negara maju dan kegiatan *financial inclusion* atau inklusi keuangan difokuskan kepada kelompok yang kurang mampu dalam mengakses layanan dan produk keuangan (Bank Indonesia).

Berbagai negara di dunia, merumuskan cara untuk dapat menurunkan *financial exclusion* dengan menggunakan pendekatan secara komprehensif, yaitu menyusun suatu strategi nasional antara lain Indonesia, Nigeria, Tanzania atau melalui program terpisah, seperti edukasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca krisis tahun 2008. Pendekatan menggunakan suatu strategi nasional mencakup tiga aspek, yaitu penyediaan produk yang cocok, penyediaan sarana pelayanan yang sesuai dan *responsible finance* melalui *financial literacy* dan perlindungan konsumen. Jika melihat beberapa indikator *financial inclusion* antara negara maju dan berkembang dapat dilihat dengan kepemilikan rekening (Huang & Chen, 2015). Negara di wilayah Eropa memiliki kepemilikan rekening tertinggi dibandingkan dengan benua lainnya. Sedangkan di wilayah Asia, khususnya Indonesia memiliki tingkat kepemilikan rekening yang cenderung moderat yang artinya masih adanya ketimpangan dalam distribusi kepemilikan

rekening perbankan (Sofilda, 2022). Perbandingan dari segi akses keuangan antar negara maju dan negara berkembang sangat berbeda. Di negara maju hanya 8% dari jumlah penduduknya yang belum memiliki akses keuangan, sedangkan di negara-negara berkembang persentase akses keuangan mencapai 59% dari jumlah penduduknya. Berdasarkan data yang diperoleh (TEMASEK, 2019), Indonesia dengan total penduduk dewasa sebanyak 181 juta jiwa, hanya sebanyak 42 juta jiwa yang sepenuhnya berkategori *banked* artinya mempunyai akses penuh dalam jasa keuangan. Sementara 47 juta jiwa lainnya masih berkategori *underbanked* artinya memiliki rekening bank namun tidak dengan akses investasi, asuransi dan kredit. Dan sisanya sebanyak 92 juta jiwa masih berkategori *unbanked* artinya tidak memiliki rekening bank dan tidak memiliki akses jasa keuangan lainnya.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan 2022 melakukan Survei Nasional 2022 menyampaikan bahwa indeks *financial inclusion* Indonesia sebesar 85,10% dalam jangka 3 tahun mengalami peningkatan 8,91% terhadap pemahaman dan akses keuangan. Meskipun demikian, angka tersebut masih terlihat rendah apabila melihat indeks dari negara tetangga seperti Singapore, Thailand dan Malaysia. Di Tahun 2022 indeks *financial inclusion* Singapore telah mencapai angka yang tinggi sebesar 98%, diikuti oleh Thailand sebesar 95,58% dan Malaysia sebesar 88,37%.

Financial inclusion merupakan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang memberikan manfaat dan tercapai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara berkelanjutan (*World Bank*, 2016). Hasil Survei Nasional terkait tingkat *financial inclusion* berdasarkan sektor jasa keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). (Diakses pada tanggal 26/03/2024)

GAMBAR 1. 1
TINGKAT *FINANCIAL INCLUSION* BERDASARKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Berdasarkan Gambar 1.1 Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki akses ke produk dan layanan perbankan, memahami pentingnya memiliki asuransi, berinvestasi di pasar modal serta menggunakan layanan lembaga keuangan mikro untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Meskipun tingkat *financial inclusion* di sektor jasa keuangan terus meningkat, masih terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian seperti dana pensiun dan pegadaian. Upaya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program edukasi dan pelatihan, memperluas akses, mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan tingkat *financial inclusion* di Indonesia dapat terus meningkat dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

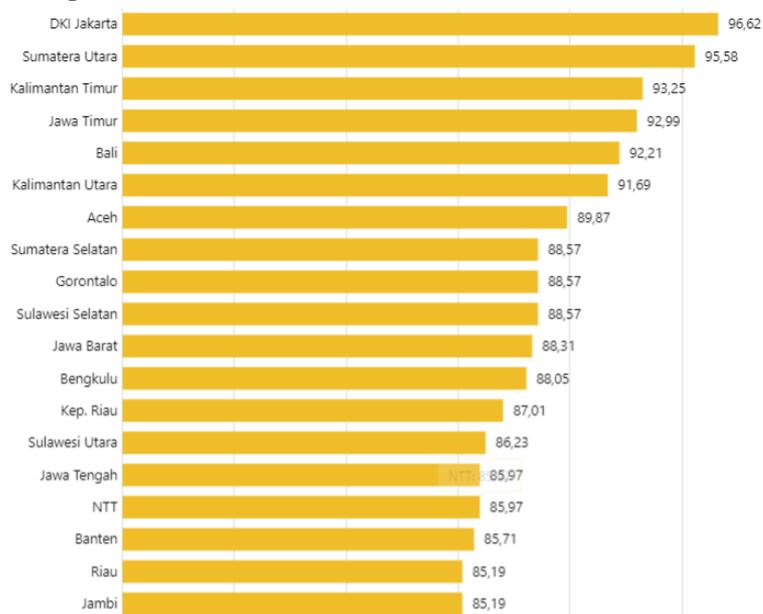
Financial inclusion merupakan suatu hal yang penting untuk memberikan akses keuangan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Tingkat *financial inclusion* yang tinggi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Annisa Dea Amaliah, 2024

PENGARUH *FINANCIAL LITERACY* DAN *FINANCIAL SELF-EFFICACY* TERHADAP *FINANCIAL INCLUSION* (STUDI PADA GENERASI Z DI KOTA JAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dengan akses yang lebih besar ke layanan keuangan, masyarakat dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, meningkatkan kesejahteraan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan, menggambarkan indeks *financial inclusion* di Indonesia sebanyak 34 provinsi dengan 14.634 responden di Indonesia.



Sumber: (Databoks, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

GAMBAR 1. 2 INDEKS *FINANCIAL INCLUSION* PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2022

Gambar 1.2 menerangkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) diketahui bahwa indeks *financial inclusion* di Indonesia hanya 19 provinsi dari 34 provinsi di atas rata-rata indeks *financial inclusion* nasional yaitu 85,10% pada tahun 2022. Persebaran indeks *financial inclusion* tahun 2022 memberikan indikasi bahwa tingkat *financial inclusion* tertinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta (96,62%). Berdasarkan data di atas, berkenaan dengan indeks *financial inclusion* di DKI Jakarta termasuk pada kategori sangat tinggi, dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian faktor apa yang menyebabkan DKI Jakarta berada di posisi tertinggi.

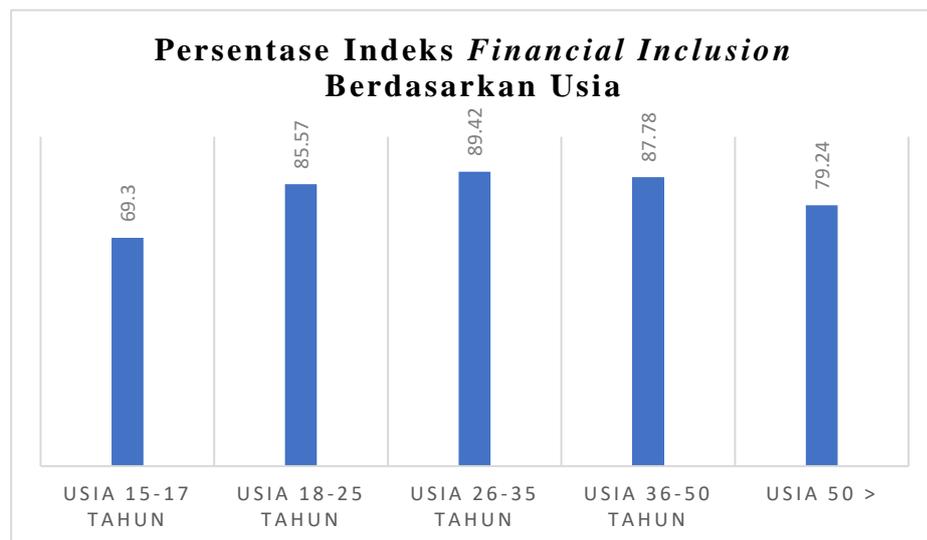
Annisa Dea Amaliah, 2024

PENGARUH *FINANCIAL LITERACY* DAN *FINANCIAL SELF-EFFICACY* TERHADAP *FINANCIAL INCLUSION* (STUDI PADA GENERASI Z DI KOTA JAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Faktor-faktor yang menyebabkan indeks *financial inclusion* DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya dikarenakan DKI Jakarta merupakan provinsi megapolitan dengan tingkat aktivitas keuangan dan perekonomian tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian sehingga konsumsi pada masyarakat di Jakarta tinggi dalam hal pendapatan dan pengeluaran dan *financial inclusion* di Jakarta berkembang pesat. Jakarta memiliki nilai penetrasi perbankan, ketersediaan layanan perbankan maupun penggunaan jasa perbankan paling tinggi yang disebabkan oleh aktivitas perekonomian yang tinggi, selain itu menunjukkan bahwa seluruh bank di Indonesia memiliki layanan di DKI Jakarta dan alasan lainnya datang dari segi masyarakat DKI Jakarta yang diindikasikan hampir seluruh masyarakat memiliki setidaknya satu rekening perbankan (Sheraphim, 2018). Walaupun DKI Jakarta termasuk dalam kategori provinsi dengan indeks *financial inclusion* tinggi, masih ada keterbatasan yang ditemukan seperti hanya menggunakan metode dan alat pembayaran non tunai tanpa mengetahui dampak dan sumbangsih yang dapat mereka berikan kepada negara (Kirana & Havidz, 2020).

Dilansir dari laporan statistik Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, menggambarkan persentase indeks *financial inclusion* berdasarkan klasifikasi usia.



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

GAMBAR 1.3 **PERSENTASE INDEKS *FINANCIAL INCLUSION* BERDASARKAN USIA**

Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan hubungan indeks *financial inclusion* berdasarkan usia. Meskipun terjadi peningkatan secara keseluruhan, masih ada beberapa kelompok usia yang memerlukan perhatian lebih, terutama kelompok usia muda. Kelompok usia muda memiliki indeks *financial inclusion* yang relatif lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya. Karena pada usia tersebut, banyak individu belum memiliki penghasilan tetap dan belum sepenuhnya mandiri secara finansial.

Pentingnya pemahaman *financial inclusion* sejak dini untuk menghindari berbagai risiko yang timbul bagi generasi muda khususnya Generasi Z, salah satu risiko yang fatal yaitu kesehatan yang dapat menyebabkan depresi dan bisa menyebabkan kematian (Ibrahim, 2023). Generasi Z lahir di tahun 1997 – 2012 saat ini memiliki populasi terbesar di Jakarta yaitu dengan persentase 25,65% dari total penduduk kota Jakarta (Databoks, 2021). Menurut data sensus BPS Kota Jakarta, jika berdasarkan kelompok usia 15 – 24 tahun memiliki jumlah sebesar yaitu 1.693.325 jiwa pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Jakarta, 2022). Beberapa tahun kedepan, Generasi Z akan berada pada kelompok usia produktif, diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan generasi menjadi topik yang sedang hangat dibahas dalam masyarakat, karena setiap generasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda (Christiani & Ikasari, 2020). Generasi yang menjadi sorotan terbaru adalah generasi Z atau yang sering disebut *iGeneration* atau generasi internet. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memperluas akses layanan dan jasa keuangan, berbagai upaya dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan jaringan internet. Peran internet sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan. Generasi Z tumbuh dan berkembang seiring dengan digitalisasi di berbagai aspek. Generasi Z ahli dalam mengoperasikan berbagai media teknologi (*digital natives*) dan memiliki karakter *multitasking* yang membedakan dengan

generasi sebelumnya (Christiani & Ikasari, 2020). Ditengah berbagai potensi yang positif terhadap Generasi Z, mereka masih dihadapkan pada tantangan terkait *financial inclusion*. Walaupun Generasi Z memiliki akses ke dunia informasi global, masih banyak diantara mereka yang belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan untuk mencapai *financial inclusion* yang baik (Indriastuti et al., 2023).

Financial inclusion perlu dikembangkan dalam kalangan generasi muda, karena apabila akses kemudahan dan pengetahuan yang diberikan dapat membantu mereka dalam mengakses produk keuangan dan memahami manfaatnya (Sheda, 2023). Bagi generasi Z, diperlukan dorongan untuk meningkatkan akses kelompok ini ke layanan keuangan formal yang memungkinkan mereka berinvestasi dalam pendidikan untuk meningkatkan kemampuan kerja dan perspektif profesional di masa akan datang. Akses terhadap layanan keuangan formal juga memungkinkan kaum generasi Z untuk memperoleh otonomi dalam masyarakat dan menjadi pelaku sosial-ekonomi yang aktif di Indonesia. Selain itu, akses terhadap layanan dan prpduk menawarkan kesempatan untuk mengembangkan inisiatif kewirausahaan dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Tujuan dari *financial inclusion* untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas keuangan di masyarakat, membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, kemampuan memahami, menganalisis serta mengelola keuangan. *Financial inclusion* sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam membantu masyarakat menjadi independen secara keuangan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (Yoo & Tae, 2017). Pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan *financial inclusion*. Urgensi pemerintah dalam meningkatkan *financial inclusion* yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan sistem keuangan yang stabil dan mengurangi ketimpangan antarindividu dan antardaerah melalui peningkatan akses layanan keuangan bagi seluruh masyarakat. Peningkatan akses layanan keuangan dilakukan dengan meningkatkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Pada sisi permintaan, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas ekonomi dan keuangan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem

keuangan. Pada sisi penawaran, pemerintah meningkatkan ketersediaan layanan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Bank Indonesia, 2014).

Musa et al. (2024) berpendapat bahwa *Theory of Reasoned Action* (Fishbein & Ajzen, 1975), *Theory Planned behavior* (Ajzen & Fishben, 1991) merupakan dua teori yang paling sering digunakan oleh peneliti menjelaskan kemampuan seseorang dalam mengakses layanan keuangan (*financial inclusion*). TRA berasumsi bahwa tindakan seseorang dilatarbelakangi oleh sikap dan persepsinya terhadap apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya (norma subjektif). Semakin kuat sikap dan subjektivitasnya, maka semakin besar niatnya untuk melakukan tindakan atau perilaku tersebut, meskipun hal tersebut tidak selalu benar. TPB menjadi dasar kerangka penelitian karena merupakan penyempurna dari TRA. Menurut TPB, perilaku seseorang dapat diprediksi tidak hanya dari sikapnya, norma subjektifnya dan niatnya, tetapi dari sejauh mana ia yakin terhadap kendali atau kemampuan dan kapasitas untuk melakukan perilaku tersebut.

Kerangka penelitian dalam studi ini menggambarkan TPB seperti sikap, perilaku, niat, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan, untuk menjelaskan perilaku seseorang terkait dengan *financial inclusion* (Maune et al., 2021). Studi mengungkapkan beberapa alasan mengapa individu berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam layanan keuangan. Secara khusus, alasan yang memengaruhi keinginan individu untuk berpartisipasi dalam *financial inclusion* dapat berupa aksesibilitas layanan keuangan dan literasi terkait layanan keuangan. Shneor & Munim (2019) berpendapat bahwa niat memotivasi tindakan untuk berpartisipasi dalam *financial inclusion* bahwa kontrol perilaku yang dirasakan dan norma subjektif merupakan kunci bagi perilaku individu seperti partisipasi dalam *financial inclusion*. Oleh karena itu, mengadopsi model TPB dapat membantu memprediksi niat dan perilaku aktual terkait *financial inclusion* (Maune et al., 2021).

Penelitian sebelumnya mengenai *financial inclusion* dikaitkan dengan *financial literacy* dan *financial self-efficacy*. Sejumlah penelitian telah dilakukan

menemukan bahwa *financial literacy* berpengaruh terhadap *financial inclusion* sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Antony & Joseph, 2021; Pramesti & Yulianti, 2021; Pulungan & Ndururu, 2019; Rashdan & Eissa, 2020). Penelitian lain menemukan bahwa *financial self-efficacy* berpengaruh terhadap *financial inclusion* sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari & Adyni, 2021; Mindra & Moya, 2017). Sementara penelitian lain yang dilakukan oleh W. W. Putri & Hamidi (2019) menunjukkan *financial literacy* tidak berpengaruh terhadap *financial inclusion*.

Gerakan keuangan inklusif diselenggarakan untuk menekan dan mengurangi jumlah masyarakat yang *unbanked*, salah satunya di Indonesia (Jaya, 2019). Faktor penyebab masyarakat *unbanked* yaitu tingkat pendidikan, kondisi ini mempengaruhi daya pengetahuan keuangan individu (Ilahiyah et al., 2021; Jaya, 2019; Schmied & Marr, 2016; Sethi & Sethy, 2019; Sharma, 2016). Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk dapat menekan laju persentase jumlah masyarakat yang *unbanked*. Pernyataan ini didukung oleh beberapa literatur bahwa masyarakat yang berpendidikan dan memiliki *financial literacy* dapat mensukseskan *financial inclusion* (Ilahiyah et al., 2021; Jaya, 2019; Pham & Doan, 2020; Ratnawati, 2020a). *Financial literacy* mencakup pengetahuan mengenai konsep dasar keuangan, seperti dasar bunga majemuk, perbedaan nilai nominal dan nilai riil, pengetahuan dasar mengenai diversifikasi risiko, nilai dari uang, nilai waktu dan lain-lain (Grohmann, 2017; Ramesh Prasad, 2014; Trinugroho et al., 2017).

Pengetahuan, keyakinan dan keterampilan keuangan yang dimiliki oleh seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku keuangan (Mien & Thao, 2015). Dari peningkatan pengetahuan akan berdampak pada partisipasi yang aktif dalam kegiatan mengenai keuangan dan perilaku keuangan yang lebih positif bagi individu (Ilahiyah et al., 2021). Jika dilihat dari jangka waktu panjang, perilaku dengan sikap seorang individu akan terlihat positif dan menunjukkan perilaku keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan individu yang memiliki sikap dan perilaku keuangan dalam jangka pendek. Pemerintah mempunyai peranan penting

yang harus diperhatikan mengenai *financial literacy* dan *financial inclusion*. Dalam hal ini, *financial literacy* mempunyai dampak terhadap dalam peningkatan *financial inclusion* (Pham & Doan, 2020; Ratnawati, 2020b; Sahela et al., 2021).

Pentingnya *financial literacy* berdasarkan hasil riset *Financial Fitness Index* (2021) menunjukkan bahwa skor indeks kesehatan keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah hanya sebesar 37,72 dari skor maksimal 100. Skor tersebut dihitung berdasarkan empat area yaitu keuangan dasar (*financial basic*), keamanan keuangan (*financial safety*), pertumbuhan keuangan (*financial growth*) dan kebebasan keuangan (*financial freedom*). Skor tertinggi berada pada *financial basic* dan masuk ke dalam kategori cukup baik. Sementara itu, dilihat dari area *financial safety* masih sangat rendah dengan indikator meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan keuangan keluarga, menabung, dana untuk bertahan hidup jika kehilangan pekerjaan, dana darurat. Skor yang paling rendah ditunjukkan pada area *financial freedom* dengan indikator pemasukan pasif secara rutin dan *financial growth* dengan indikator investasi dan perencanaan dana pensiun.

Financial literacy dalam TPB (*Theory of Planned Behaviour*) menerangkan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks *financial literacy*, ketiga komponen ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan memahami *financial literacy* terkait dengan TPB, maka kita dapat mengembangkan program *financial literacy* yang lebih efektif dan dapat mendorong individu untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan mencapai tujuan keuangan.

Financial literacy dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam maupun luar (Ariani, 2015). Sejalan dengan pernyataan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa faktor yang berdampak pada derajat *financial literacy* yaitu jenjang pendidikan, gender dan besar pendapatan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi *financial literacy* yakni jenis kelamin, pendapatan orang tua dan pengalaman kerja (Nurulhuda & Lutfiati, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Alawi et al., 2020; Farida et al., 2021; Fitriah & Ichwanudin, 2020; M. Noor et al.,

2020; Okello Candiya Bongomin et al., 2016) menemukan hubungan antara *financial inclusion* dengan *financial literacy*. Menurut penelitian Sethi & Ascharya (2018) *financial inclusion* dan *financial literacy* memiliki dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (meningkatnya standar hidup dan penurunan tingkat kemiskinan).

Financial self-efficacy menjadi salah satu faktor pendukung lainnya untuk meningkatkan indeks *financial inclusion*. Konsep *financial self-efficacy* dibentuk dari *konsep self-efficacy* yang terfokus pada ukuran keyakinan diri mengenai kemampuannya. *Self-efficacy* menjadi suatu sikap yang ada pada diri sendiri yang berbeda dengan individu lainnya. *Self-efficacy* dapat membentuk segi kehidupan individu dalam mencapai tujuan, pilihan dan tekadnya, pola pikir positif atau negatif dan ukuran kegigihan dalam menghadapi masalah (N. Noor et al., 2020). Menurut Sina (2013) *financial self-efficacy* dapat meningkatkan cara individu dalam mengelola keuangan sehingga dapat mencapai kepuasan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari & Adyni, 2021; Mindra & Moya, 2017) menunjukkan bahwa *financial self-efficacy* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial inclusion*. Semakin tinggi tingkat keyakinan dan kepercayaan diri dalam mengelola keuangan maka semakin tinggi tingkat *financial inclusion*.

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Keyakinan individu terhadap kemampuan keuangan dapat mempengaruhi perilaku dalam mengadopsi perilaku *financial inclusion*. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif dan kendali yang dirasakan yaitu dalam konteks *financial self-efficacy*. Keyakinan dalam pengelolaan keuangan yang baik saat ini mampu mengubah kondisi keuangan di masa mendatang, seseorang akan melakukan pengelolaan keuangan terhadap uang yang dimilikinya dengan cara menabung atau berinvestasi dalam jangka waktu panjang sehingga tujuan keuangan di masa mendatang dapat tercapai.

Pusat perekonomian di Indonesia berada di Jakarta, sehingga Jakarta menjadi tolak ukur bagi kota atau provinsi yang lain. Penulis tertarik untuk meneliti

faktor apa yang menyebabkan Kota Jakarta berada pada posisi tertinggi dalam indeks *financial inclusion*. Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan diperlukan melakukan penelitian untuk menganalisis dan melihat apakah Generasi Z dapat dengan mudah mengakses layanan dan produk keuangan sehingga dapat meningkatkan *financial inclusion* yang baik. Penelitian ini meneliti mengenai “Pengaruh *Financial Literacy* dan *Financial Self-Efficacy* terhadap *Financial Inclusion* (Studi Pada Generasi Z di Jakarta)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *financial literacy*, *financial self-efficacy* dan *financial inclusion* pada Generasi Z di Jakarta.
2. Bagaimana pengaruh *financial literacy* terhadap *financial inclusion* pada Generasi Z di Jakarta.
3. Bagaimana pengaruh *financial self-efficacy* terhadap *financial inclusion* pada Generasi Z di Jakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran *financial literacy*, *financial self-efficacy* dan *financial inclusion* pada Generasi Z di Jakarta.
2. Mengetahui pengaruh *financial literacy* terhadap *financial inclusion* pada Generasi Z di Jakarta.
3. Mengetahui pengaruh *financial self-efficacy* terhadap *financial inclusion* pada Generasi Z di Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan dan perluasan teori perilaku keuangan khususnya yang

berkaitan dengan pengaruh *financial literacy* dan *financial self-efficacy* terhadap *financial inclusion*.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada aspek praktis pada pemerintah untuk lebih memperhatikan dan peduli pada upaya meningkatkan *financial inclusion* melalui *financial literacy* dan *financial self-efficacy*.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana informasi maupun acuan bagi peneliti selanjutnya khususnya penelitian mengenai pengaruh *financial literacy* dan *financial self-efficacy* terhadap *financial inclusion*.